

## **RANCANGAN**

### **LAPORAN SINGKAT RAPAT PLENO KOMISI III DPR RI TERHADAP UJI KELAYAKAN (FIT AND PROPER TEST) CALON KAPOLRI**

-----  
**(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2014-2015  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Uji Kelayakan (Fit and Proper Test).  
Hari/tanggal : Rabu, 14 Januari 2015  
Pukul : 09.25 s.d.14.12 WIB.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI  
Ketua Rapat : DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH./Ketua Komisi III DPR RI.  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Budi Utami, MSi / Kabag Set.Komisi III DPR-RI.  
Hadir : 47 orang Anggota dari 53 Anggota Komisi III DPR-RI.  
Ijin : - orang anggota.  
Acara : Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Kapolri, Komjen (Pol)  
Drs.Budi Gunawan, SH.,M.Si.

## **KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

### **I. PENDAHULUAN**

Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Kapolri oleh Komisi III DPR RI dibuka pukul 09.25 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. HM. Aziz Syamsuddin, SH, selanjutnya rapat diskors pukul 09.27 WIB. Rapat dibuka kembali pukul 09.33 WIB dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

### **II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN**

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh calon Kapolri Komjen Pol Drs, Budi Gunawan, SH., M.Si dalam penyampaian visi dan misi, diantaranya sebagai berikut:
  - Sebelum menyampaikan visi dan misi Calon Kapolri memberikan klarifikasi terkait statusnya sebagai tersangka yang ditetapkan oleh KPK, bahwa hasil penyelidikan hanya untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana, calon belum pernah dimintai keterangan oleh KPK. Terkait opini yang berkembang tentang rekening gendut yang melibatkan Perwira

Tinggi Polri, bahwa rekening calon adalah terkait dengan transaksi keuangan tetapi itu merupakan transaksi bisnis, namun hal tersebut dianggap sebagai transaksi yang mencurigakan. Dari hasil penyelidikan Bareskrim Polri transaksi tersebut adalah wajar dan telah diberitahukan kepada PPATK.

- Bahwa Calon telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada KPK, dalam LHKPN tersebut ada benda atau barang yang surat kepemilikannya belum selesai. semua harta yang dimiliki calon adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Visi calon terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong dengan memberikan jaminan kepada masyarakat akan rasa aman dan bebas dari gangguan, memiliki kemampuan yaitu professional, ulet handal dan bekerja sungguh-sungguh dalam melakukan tugas, peran dan fungsinya. memiliki sikap dan karakter yang berani tegas, bertanggungjawab, berintegritas dan penuh ketulusan dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. mengedepankan kerjasama, kemitraan dan menggali partisipasi yang seluas-luasnya dari semua komponen masyarakat.
- Sedangkan Misi calon adalah mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan, mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum, mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- Program Prioritas calon adalah sebagai berikut :
  1. Meningkatkan pemberantasan kejahatan dan cegah terjadinya Kemacetan lantas untuk memberikan rasa aman pada masyarakat
  2. Memperkuat polsek sebagai basis harkamtibmas untuk mendukung pembangunan daerah dan desa
  3. membangun polairud untuk mendukung terwujudnya indonesia menjadi poros maritim dunia
  4. mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari praktek koruptif
  5. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social melalui pemberdayaan penanganan konflik social
  6. meningkatkan profesionalisme sdm Polri dgn standar yang berkeunggulan melalui program diklat Polri berbasis kompetensi, pemecahan masalah dan teknologi informasi komunikasi
  7. melakukan peremajaan sumberdaya Densus 88 Anti Teror Polri dan Korbrimob Polri

8. Meneguhkan sinergi polisional yang proaktif guna mendukung pelaksanaan tugas Polri dan pengamanan Pemilu Kepala Daerah serentak
9. Melaksanakan penertiban dan penegakan hukum terhadap organisasi dan pelaku yang anarkis
10. Melaksanakan “perburuan dan penangkapan gembong terorisme Santoso dan jejaring terorisme”
11. Melaksanakan “aksi nasional pembersihan preman dan premanisme”
12. melaksanakan “pembentukan dan pengefektifan satgas ops Polri kontra radikal dan deradikalisasi [khusus isis]”
13. memberlakukan rekrutmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri
14. mewujudkan “polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik”
15. membentuk tim internal anti korupsi dengan melakukan kegiatan pencegahan dan penertiban tindakan koruptif terutama pungli yang dilakukan personel Polri
16. melakukan “crash program pelayanan masyarakat: pelayanan bersih dari percaloan”
17. menerapkan sistem pengawasan internal dan eksternal secara ketat terhadap pelaksanaan program prioritas komitmen calon komitmen untuk mewujudkan insan bhayangkara dan organisasi Polri yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menjunjung etika dan moral.

➤ Komitmen Calon apabila menjadi Kapolri adalah sebagai berikut :

1. Akan melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Kapolri sebelumnya.
2. Independen dalam menegakkan hukum, bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum serta menjunjung tinggi HAM,
3. Menuntaskan penanganan perkara secara transparan dan akuntabel,
4. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat, nyaman, dan humanis
5. Komitmen membangun sinergi polisional yang proaktif dengan seluruh stakeholder guna mendukung pelaksanaan tugas Polri
6. Mengembangkan sistem diklat Polri dalam rangka meningkatkan kompetensi dan integritas SDM Polri
7. Menunjukkan teladan pemimpin yg memiliki kepekaan, proaktif, bernyali, tegas dan tidak ragu-ragu, bertanggung jawab, melayani dan memberdayakan bawahan, serta mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga guna keberhasilan tugas Polri.
8. Menerapkan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan menindak bagi yang melakukan pelanggaran serta meningkatkan kesejahteraan pers Polri

- Pemaparan lengkap telah disampaikan secara tertulis oleh Calon Kapolri kepada seluruh Anggota Komisi III DPR RI.
2. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut :
- Bagaimana calon membangun sinergi antar penegak hukum, apa kriteria calon menjadikan seseorang sebagai tersangka.
  - Realitas peristiwa hukum sulit ditepis, bahwa penetapan seorang calon Kapolri dijadikan tersangka bermuatan politis, disisi lain bahwa apabila KPK menetapkan orang sebagai tersangka, pasti dilengkapi alat bukti. Meminta penjelasan kepada Calon, sesungguhnya apa yang terjadi dengan Calon.
  - Terkait strategi dan antisipasi Polri khususnya konflik yang terjadi antara TNI dan Polri, bagaimana calon menangani kasus tersebut.
  - Bagaimana sikap calon terhadap para penyidik Polri yang sudah lama ditugaskan di institusi lain.
  - Bagaimana sikap calon berkaitan perkara yang melibatkan teman, kolega, keluarga, dan bagaimana pendapat calon wacana Polri di bawah Kemendagri.
  - Grand strategi yang dicanangkan Kepolisian masih banyak permasalahan yaitu adanya potensi gangguan keamanan yang berkaitan dengan internasional, menyangkut masalah lingkungan dan perubahan iklim, isue HAM dan perbatasan wilayah yang banyak diakui oleh negara tetangga.
  - Bahwa sangkaan yang dituduhkan KPK adalah Gratifikasi, gratifikasi merupakan janji/hadiah siapa yang memberikan? hal ini merupakan kesempatan bagi calon untuk melakukan klarifikasi terhadap status tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK. Apakah surat yang di keluarkan oleh Bareskrim Polri pernah dicabut atau tidak.
  - Kejahatan ekonomi seharusnya juga menjadi prioritas dalam penanganannya oleh Polri, terutama masalah pengawasan orang-orang asing, bagaimana langkah calon menindaklanjuti hal tersebut.
  - Terkait kasus CD bajakan yang semakin marak dan disinyalir mendapat perlindungan dari oknum Kepolisian, hal ini sangat merusak perekonomian negara. Langkah apa yang akan dilakukan oleh calon dalam menangani permasalahan tersebut.
  - Bahwa tindakan preemtif dan preventif perlu dilakukan dengan berimbang, dimana seringkali penindakan justru memunculkan kesewenang-wenangan. Dalam rapat-rapat Komisi III dengan Polri diharapkan kedepan setiap fungsi Polri dapat hadir dan memaparkan program-program yang dilaksanakan.
  - Meminta kepada calon Kapolri apabila terpilih dapat melaksanakan semua program yang tertera dalam visi dan misi yang disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan dihadapan Komisi III.
  - Terkait tawuran pelajar dan miras oplosan yang meresahkan masyarakat dan banyak korban yang berjatuh, apa konsep calon dalam menangani hal tersebut.

- Agar masyarakat mengetahui hukum secara jelas dan tegas, maka calon sebaiknya menerangkan bagaimana penyidikan itu bisa naik menjadi penyidikan dan bagaimana proses penyidikan seseorang dapat ditetapkan menjadi tersangka.
  - Transparansi dalam proses hukum dapat benar-benar direalisasikan karena masih banyaknya rekayasa kasus di masyarakat.
  - Komisi III DPR RI memberikan apresiasi bahwa calon termasuk calon yang baik dalam menyampaikan paparan, sedangkan penetapan sebagai tersangka bukan merupakan hal yang luar biasa, karena banyak orang ditetapkan sebagai tersangka namun tetap menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Beberapa hal yang disampaikan Calon Kapolri atas pertanyaan yang telah disampaikan, diantaranya sebagai berikut :
- Bahwa untuk menetapkan tersangka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan alat bukti sehingga tidak ada kesewenang-wenangan di dalam sistem hukum.
  - Terkait sistem tindak pidana yang ditemukan oleh lembaga lain dan Polri juga menemukan tindak pidana, maka dilakukan koordinasi dan secara bersama melakukan gelar perkara dengan melibatkan para ahli.
  - Terkait kasus bentrok TNI dengan Polri yang selama tahun 2013-2014 telah terjadi 18 kali kejadian, dimana bentrokan terjadi karena kurang harmonisnya di level bawah di beberapa daerah, sehingga perlu dilakukan terobosan dengan membangun sistem pelatihan bela negara secara bersama dari level bawah hingga level pimpinan, serta mengadakan kembali latihan gabungan dan meningkatkan kegiatan silaturahmi antar satuan serta melibatkan satuan TNI. Selanjutnya, membudayakan personil Polri untuk melaksanakan pola hidup sederhana dengan membekali buku saku revolusi karakter kehidupan berbangsa.
  - Bahwa pembinaan karir serta rewards tetap diperhatikan agar loyalitas personil Polri tetap terjaga, untuk menjaga netralitas Polri di lapangan maka perlu dilakukan pembinaan secara berkala.
  - Dalam proses peradilan, berkomitmen untuk tetap menjalankannya secara profesional, akuntabel dan transparansi.
  - Terkait dengan wacana Polri di bawah Kemendagri, banyak mengalami kendala dalam menjalankan tupoksi terutama masalah anggaran, sekarang ini Polri terlihat banyak kemajuan yang signifikan dalam menjalankan tupoksinya. Sehingga posisi Polri langsung dibawah Presiden merupakan suatu langkah yang sangat tepat.
  - Terkait good governance maka calon akan melaksanakan pemberantasan terhadap kejahatan terorisme, perjudian dan narkoba yang sudah menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan.
  - Didalam program prioritas yang telah dipaparkan adalah melakukan pembenahan dalam fungsi reserse dalam menjalankan penyidikan dan penyelidikan dengan cara merevisi SOP dan mensosialisasikannya.

- Terkait penguatan fungsi pengawasan dan pelayanan masyarakat, terutama masalah jilbab bagi Polwan, saat ini sedang disusun SOP dan segera diselesaikan untuk dapat diaplikasikan di lapangan.
  - Langkah Polri agar personil dapat mengatasi unjuk rasa dengan baik, akan dilakukan pelatihan secara rutin serta membekali dengan SOP.
  - Terkait dengan permasalahan terorisme, dengan melaksanakan program deradikalisasi yang bekerjasama dengan BNPT serta tokoh-tokoh masyarakat dimana dalam pelaksanaannya tetap menggunakan SDM yang ada dan tidak menggunakan tenaga atau bantuan dari asing.
  - Terkait penetapan sebagai tersangka, bahwa penetapan ini tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu Pasal 180 KUHP, dimana selama ini belum ada pemeriksaan, dengan demikian KPK dinilai telah melewati asas praduga tak bersalah dan dapat dikatakan sebagai pembunuhan karakter atau pengadilan oleh media massa. Bahwa selama ini calon belum pernah ditanyakan oleh KPK dan penetapan tersangka ini dirasa cukup janggal karena bersamaan dengan pencalonan sebagai Kapolri dan pelaksanaan Uji Kelayakan (fit and proper test). Kasus ini sebelumnya sudah ditangani oleh Bareskrim Polri dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Calon merasa bahwa ada hal yang mengganggu terkait kewibawaan pemerintah dan institusi Polri.
  - Untuk kasus-kasus narkoba, Polri akan membentuk satgasus Narkoba dan akan memecat oknum Polri apabila terbukti melakukan tindak pidana narkoba.
  - Terkait dengan pengamanan di wilayah perbatasan laut maka perlu dibentuk Polairud di wilayah yang cukup rentan dan meningkatkan personil Polri dalam menjaga wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara lain.
  - Terkait saran dan masukan dari para Anggota Komisi III menjadi dimasukkan ke dalam program prioritas setelah dilakukan penyempurnaan.
4. Calon Kapolri, Komjen (Pol) Drs.Budi Gunawan, SH.,M.Si. menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DPR RI, surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh calon Kapolri, sebagai berikut:

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : .....

Tempat dan tanggal lahir : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....  
Bertempat tinggal di : .....  
.....  
.....

Dengan ini menyatakan secara jujur dan sebenarnya serta bersedia untuk mengangkat sumpah/janji menurut Agama yang saya anut, Agama .....; bahwa seluruh pernyataan, keterangan, informasi, dan atau bukti yang saya nyatakan, berikan atau sampaikan, baik secara lisan maupun tertulis kepada KOMISI III DPR-RI adalah benar guna memenuhi persyaratan Uji Kelayakan sebagai Calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Apabila saya terpilih menjadi Kapolri, saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kapolri untuk melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta akan menolak atau tidak menerima apapun secara langsung maupun tidak langsung atau tidak mau dipengaruhi oleh siapapun juga dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban saya yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada saya.

Bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas pernyataan saya ini, dan bersedia dituntut menurut hukum, apabila pernyataan saya ini terbukti tidak benar, baik untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya termasuk untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Kapolri, apabila saya terpilih menjadi Kapolri.

Demikian Surat Pernyataan tertulis ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari manapun, di hadapan KOMISI III DPR-RI pada tanggal 14 Januari 2015.

Jakarta, 14 Januari 2015  
Saya yang menyatakan,

( ..... )

5. Setelah selesai melakukan Uji Kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Kapolri, Komisi III DPR RI melanjutkan Rapat (Pleno) Komisi untuk memberikan persetujuan atau penolakan pemberhentian dan pengangkatan Calon Kapolri atas nama Komjen Pol. Drs. Budi Gunawan, SH.,M.Si.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 14.12 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI**